BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupannya, manusia setidaknya mengalami tiga peristiwa yaitu pada saat ia dilahirkan, pada saat ia melangsungkan perkawinan, dan pada saat ia meninggal dunia, sehingga diperlukannya hukum untuk mengatur hak serta kewajiban dari peristiwa penting tersebut sehingga jelaslah apa yang seharusnya manusia dapatkan dan berikan ketika peristiwa itu terjadi.

Ketika manusia meninggal, ia melepaskan segala urusan duniawi yang melekat pada dirinya, baik itu merupakan hak-haknya yang dia miliki maupun kewajiban-kewajibannya yang pada seharusnya dia lakukan, sehingga hukum tersebut diperlukan untuk mengatur tentang bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹

¹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm 43.

Hukum yang mengatur mengenai hubungan hukum antar orang yang telah meninggal dunia dengan mereka yang telah ditinggalkan dinamakan juga dengan hukum waris. Di Indonesia peraturan hukum waris ini belum bisa di *unifikasi* hukum artinya ada pluralisme hukum waris yang terjadi di Indonesia, dimana satu pihak peraturan hukum waris masih mengikuti agamanya yaitu hukum waris islam yang dimana pengaturannya ada di dalam kitab suci umat islam yaitu Al –Quran ada juga pengaturan mengenai hukum waris melalui perundang-undangan yang dibawa oleh belanda pada masa *colonial* yang diatur dalam kitab undang-undang hukum perdat (KUHPer), sedangkan pihak lain, pembagian warisan menggunakan hukum daerah masing masing yait hukum adat.

Sudah menjadi nasib bagi manusia selama hidupnya untuk ditinggalkan dan meninggalkan orang orang disekitarnya yang oleh karena itu manusia pasti menjadi pewaris maupun ahli waris yang diatur dalam hukum disekelilingnya yang mengatur tentang pewarisan baik itu merupakan hukum waris adat,islam,maupun perdata barat.

Di Indonesia, tiap tiap daerah memiliki adat masing masing yang dilatar belakangi oleh sejarah pembentukan masyarakat adat di jaman nenek moyang mereka dahulu sehingga terjadi *pluralisme* dalam hukum adat yang belum tentu sama satu dengan yang lain, jadi dengan kata lain telah terjadi juga *pluralisme* terhadap hukum waris adat dari tiap tiap daerah yang ada di Indonesia.

Dalam hukum adat yang tersebar luas di Indonesia, terdapat 3 macam prinsip garis keturunan yang digolongkan berdasarkan siapa yang menjadi penerus generasi adatnya di masa mendatang, hal ini disebut juga dengan sistem kekeluargaan, adapun pembagian sistem kekeluargaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Sistem *patrilineal* yaitu system kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayahnya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ibunya jatuh di luar batas itu.²
2. Sistem *matrilineal* yaitu sistem kekeluargaan yang menghitung hubungan kekerabatan melalui orang wanita saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa bagi tiap tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibunya masuk di dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan semua kaum kerabat ayahnya jatuh di luar batas itu.³
3. Sistem *parental* yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik pihak ayah maupun pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki laki dan anak wanita dalam hukum waris sama dan sejajar.⁴

² Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta : Rajawali Pers, 2010), hlm.50.

³ *Ibid.*, h.51

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam perspektif islam, adat, dan BW.* (Bandung: Refika Aditama, 2005), H.42.

Prinsip garis keturunan berpengaruh terhadap penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang diwariskan (baik yang materil maupun immaterial)⁵ yang mengakibatkan timbulnya berbagai macam sistem kewarisan adat di Indonesia.

Prinsip sistem kekeluargaan di Indonesia yang menimbulkan berbagai macam sistem hukum tersebut banyak menyebabkan problema di masyarakat, karena dalam satu sistem kekeluargaan memiliki hukum adat yang berbeda misalkan dalam hukum adat batak dikenal adanya marga, yang dimana tidak boleh di adakanya perkawinan satu marga karena perkawinan satumarga dalam adat batak dianggap perkawinan sedarah atau perkawinan *incest*. Karena adanya hukum adat yang berbeda-beda dari tiap tiap daerah sehingga menimbulkan adanya perbedaan dalam hukum warisnya antara *patrineal*, *matrenial*, maupun *parental*.

Soepomo menjelaskan dalam bukunya bahwa hukum waris itu memuat peraturan peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut tidak menjadi *akuut* oleh sebab orang tua meninggal dunia. Memang meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, akan tetapi seharusnya tidak

⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h.260

mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.⁶

Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem kewarisan di dalam masyarakat Indonesia, tiga sistem kewarisan tersebut yaitu

1. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan dimana para ahli waris mewarisi secara perorangan, contoh : Batak, Jawa, Sulawesi.
2. Sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara bersama sama(kolektif) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi bagi pemilikannya pada masing masing ahli waris, contoh : Minangkabau
3. Sistem kewarisan mayorat:
 - a. Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, contoh : Lampung
 - b. Mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal dunia, adalah ahli waris tunggal, contoh : pada masyarakat di tanah somendo.⁷

⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h.259

⁷ *Ibid*

Dalam hal ini, sistem pewarisan merupakan sistem yang berbeda dari sistem kekeluargaan adat, artinya belum tentu sama sistem kekeluargaannya, maka sama juga sistem pewarisannya.

Menurut hukum adat, untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok yaitu :⁸

1. Garis pokok keutamaan
2. Garis pokok penggantian

Garis pokok keutamaan dapat diartikan yang dimana garis keturunan yang mengutamakan para pihak keturunan anak laki-laki saja yang diutamakan dan ditarik dari segi patrilineal oleh seorang bapak.

Sedangkan, garis pokok penggantian dapat dikatakan yang dimana ditarik dari segi pergantian apabila para pihak tidak memiliki ahli waris maka dapat digantikan dalam artian dapat dihibahkan.

Sedangkan proses penyerahan barang harta benda kekayaan seseorang kepada turunannya, seringkali sudah dilakukan ketika orang tua (pewaris) masih hidup. Pembagian harta tersebut dilakukan secara kerukunan bahkan terkadang pembagian itu juga dihadiri penghulu (kepala desa) untuk menambah terangnya pembagian tersebut. Apabila pembagian dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka perlu diperhatikan, bahwa walaupun pada dasarnya semua anak laki-laki mempunyai hak

⁸ *Ibid.*, h.261

yang sama terhadap harta pembagian orang tuanya, namun pembagian harus dilakukan dengan sangat bijaksana sesuai pesan/kehendak pewaris sebelum meninggal dunia. Apabila pembagian itu terjadi sengketa maka dicoba diselesaikan melalui musyawarah.⁹

Menurut Bushar Muhammad, keturunan dapat bersifat :¹⁰

1. Lurus

Apabila orang seorang merupakan keteunan langsung dari yang lain, misalnya antara bapak dan anak; antara kakek, bapak dan anak. Disebut lurus kebawah kalau dirangkainya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan disebut lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak ke kakek.

2. Menyimpang atau bercabang

Apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung) , atau sekakek dan nenek dan lain sebagainya.

Selain keturunan dapat bersifat lurus atau menyimpang, keturunan ada tingkatan atau sejejerat, misalnya seorang anak merupakan keturunan tingkat satu

⁹ Eman Suparman, *Op.Cit.*, h.48.

¹⁰ Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Masyarakat, *Anotasi Putusan Pengadilan Mengenai Pertanahan Tentang Waris*, (Jakarta: Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, 2016) h.27

dari bapaknya, cucu merupakan keturunan tingkat dua dari kakenya, dan sebagainya.¹¹

Jadi, pada dasarnya penarikan garis keturunan yang berhak mewaris dari tiap-tiap adat berbeda-beda, tergantung masyarakatnya bagaimana menyikapinya, hal ini dikarenakan hukum adat tumbuh dari sistem kekeluargaan adat setempat, sehingga yang mematumhinya adalah masyarakat adat setempat itu sendiri.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa pembagian waris dalam sistem kewaisan adat patrilineal sangatlah berbeda sederhana sehingga seharusnya tidak lah terjadi bentrokan antar masing-masing ahli waris, sekalipun memang adanya sengketa harta warisan antar sesama ahli waris, sebaliknya diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat agar tidak berlanjutnya rasa permusuhan antar sesama suku adat.

Namun pada kenyatannya tidak begitu yang terjadi pada kasus yang terjadi pada perkara waris di Pengadilan Negri Medan Sumatera Utara antara Theresia BR. Manurung, Tatiana Sitompul, dan Ivo Nanang Sitompul selaku pengugat melawan Sahattua Sitompul selaku tergugat dan turut serta menggugat, Anna Julietta Sitompul, Yosef Levi S, dan Victoria, Herlis Marissiana, S.E, terkait pembagian harta peninggalan dari almarhum Harenta Sitompul.

Bedasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait sengketa mengenai warisan tersebut. Dari permasalahan tersebut,

¹¹ *Ibid*

penulis mengambil judul **Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Hukum Adat Batak Toba Terhadap Anak Laki-Laki Bungsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015 PN Mdn)**. Dalam kasus yang dibahas oleh penulis terdapat kekeliruan yang ada, yang dimana terdapat pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, yakni seharusnya anak laki-laki bungsu lebih besar mendapatkan bagiannya ketimbang anak lainnya, dikarenakan dalam Adat Batak Toba anak laki-laki bungsu menjadi tanggung jawab sebagai menjaga orang tuanya dimasa tuanya, namun dalam kasus tersebut faktanya anak laki-laki bungsu belum mendapat bagiannya malah sebaliknya anak laki-laki sulung mengambil semua harta kekayaan dari harta peninggalan orang tuanya.

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian waris yang berlaku pada masyarakat adat Batak Toba?
2. Bagaimana kedudukan anak laki-laki bungsu pada masyarakat adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015 PN Mdn)?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan Uraian diatas, Tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk memberikan gambaran terhadap pembagian waris yang ada pada masyarakat adat Batak Toba.
2. Untuk menganalisa kedudukan anak bungsu anak laki-laki pada masyarakat adat Batak Toba dalam hal pembagian harta peninggalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015 PN Mdn).

D. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹² Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹³

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Analisis Yuridis Terhadap Pembagian Harta Warisan Almarhum Harenta Sitompul Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015 PN Mdn) merupakan suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini berbasis pada analisis norma hukum. Baik

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), h.3.

¹³ *Ibid.*, h.34.

hukum dalam perundang-undangan, maupun hukum dalam putusan pengadilan. Dengan demikian objek yang dianalisis adalah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mdn.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁵

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan serta memberikan gambaran terhadap pembagian harta waris menurut hukum adat Batak Toba.

3. Data dan Sumber Data

Lazimnya di dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama disebut dengan data primer atau data dasar dan yang kedua dinamakan dengan data sekunder.¹⁶

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data kepustakaan digolongkan menjadi dua bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

¹⁴ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT, Raja Gafindo Persada, 2011), h.43.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h.10

¹⁶ *Ibid.*, h.12.

Bahan hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bahan – bahan hukum (peraturan perundang – undangan) yang megikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang Undang dasar 1945, Hukum Adat Batak dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/P.dt.G/2015/PN Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dimaksud merupakan bahan hukum yang memberikan, penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku literature, buku hasil penelitian, tulisan dan makalah serta artikel terkait dengan topik sebagai referensi penulisan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis hanya menggunakan data sekunder yang bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁷

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan yaitu membaca dan mempelajari berbagai macam buku ilmiah, buku wajib, dan peraturan perundang undangan serta melalui data data yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan skripsi ini. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul

¹⁷ Ibid

dan perpustakaan Universitas Indonesia untuk mendapatkan data data yang diperlukan dalam pembuatan skripsi ini.¹⁸

5. Analisis Data

Dalam membahas permasalahan, data hasil penelitian disusun secara sistematis dan disajikan serta diolah kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang sistematis mengenai permasalahan Analisis Yuridis Mengenai Pembagian Harta Warisan almarhum Harenta Sitompul secara waris Adat Batak yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penelitian dilakukan secara kualitatif, yaitu analisis data dengan lebih menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut.¹⁹

6. Cara Penarikan Kesimpulan

Dalam mengambil kesimpulan pada penulisan skripsi ini digunakan metode deduktif, yaitu metode menarik kesimpulan berdasarkan data yang bersifat umum yaitu berdasarkan hukum adat masyarakat Batak dengan data yang bersifat khusus yaitu sengketa pembagian harta warisan Harenta Sitompul.

E. Definisi Oprasional

Bab ini menguraikan konsep terkait istilah hukum adat, hukum waris adat, pewaris, ahli waris, harta peninggalan.

1. Hukum Adat

¹⁸ *Ibid.*, h.21

¹⁹ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Op.Cit.*, h.32

Hukum Adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku.²⁰

2. Hukum Waris

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang barang harta benda dan barang yang tidak berwujud benda dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.²¹

3. Pewaris

Pewaris adalah orang yang memberikan pusaka, yakni orang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta keayaan, pusala, maupun surat wasiat.

4. Ahli Waris

Ahli waris adalah sekalian orang yang menjadi waris, berarti orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris.²²

5. Warisan

²⁰ Sri Warjiyati. *Memahami Hukum Adat*. (Surabay : IAIN, 2006) h.16

²¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.259

²² Eman Suparman, *Op.Cit.*, h.2

Warisan berarti harta peninggalan, pusaka, dan surat wasiat.²³

6. Mewarisi

Yaitu mendapatkan harta pusaka, biasanya segenap ahli waris adalah mewarisi harta peninggalan pewarisnya.²⁴

F. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM HUKUM ADAT

Dalam Bab ini penulis memberi uraian mengenai pengertian hukum adat, masyarakat adat, sifat corak masyarakat adat.

BAB III : HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai Kekerabatan adat Batak Toba, dilanjutkan Waris adat Batak Toba

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

**BAB IV : KEDUDUKAN HUKUM WARIS ADAT BATAK TOBA
TERHADAP ANAK LAKI-LAKI BUNGSU (Studi Kasus
Nomor 127/Pdt.G/2015/PN Mdn).**

Bab ini mendeskripsikan mengenai objek perkara yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Mdn., pada bab ini juga dijelaskan mengenai uraian kasus posisi terhadap sengketa pembagian harta peninggalan almarhum Harenta Sitompul yang diputus oleh Pengadilan Negeri yang terdiri dari identitas para pihak, duduk perkara, dan penyelesaian perkara dari Putusan tersebut.

Dalam Bab ini diuraikan mengenai pembagian harta warisan almarhum Harenta Sitompul kepada ahli warisnya menurut hukum Batak Toba dan menganalisis kesesuaian putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 127/Pdt.G/2015/PN.Mdn mengenai pembagian harta warisan almarhum Harenta Sitompul kepada ahli warisnya. Dalam bab ini juga akan menjelaskan dan menggambarkan mengenai aturan aturan hukum adat dan mengenai pembagian waris yang di persengketakan tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan terhadap sengketa dalam pembagian waris masyarakat adat Batak.